

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017)

Charles Simabura, *Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2016)

Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasannya*, (PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012)

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010)

Fatkhurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti; Bandung, 2004)

Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Ichtiar Baru : Jakarta, 1994)

Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI; Jakarta, 2006)

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016)

Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rodakarya, 2011)

Mahmuddin, *Jalan Panjang Menuju Gerakan Rakyat Anti Korupsi*, (KPTPK, Jakarta, 2003)

Maria Farida Indrianti, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, (Kanisius: Jakarta, 1998)

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1992)

Munawar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Konstitusi Pers: Jakarta, 2006)

Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Universitas

Indonesia Press, 2018)

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Press 2018)

Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2018)

Topo Santoso, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011)

Uthreect, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Ichtiar; Jakarta, 1962)

Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Pasca Amandemen Konstitusi)*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2016)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

JURNAL DAN ARTIKEL

Beni Kurniawan, *Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 12 No. 2, 2019

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat, Jurnal Hukum Universitas Palembang

Kaelan, Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, 2017

- M. Beni Kurniawan, *Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Magister Hukum Universitas Indonesia Vol. 11 No. 2, 2018
- Malik, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Jurnal Konstitusi Vol.7 No. 1, 2009
- Muhammad Ari Abdillah, KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Prespektif Konsep Trias Politica, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol.21 No.11, 2019
- Nanang Sri Darmadi, Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011
- Olyvianan Agustine, *Politik Hukum Penguatan Kewenangan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No.2, 2019
- Rendy Kurniawan, *Dinamikan Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Sejarah Politik; Komparasi Undang-Undang di Masa Orde Baru dan Masa Reformasi*, Jurnal Indonesia History and Education Volume 2 Nomor 2 2022
- Selfi Suryadinata, Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Tinjau dalam Hukum Ketatanegaraan, Jurnal Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 3 No.2, 2021
- SF Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 9 Vol.4, 2021
- Suraji, *Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia & Upaya Pemberantasannya*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Volume 12 Nomor 2 2010
- Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagistra, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (*State Auxiliary Institutions*), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana No. 2 Vol. 1, 2019
- Tri Mulyani, *Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Systeem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Humani Universitas Hassanuddin, Volume 6 Nomor 1, 2016
- Zainal Arifin Mochtar, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*, Jurnal Konstitusi Vol. 18, No.2,

2021

INTERNET

Indonesian Corruption Watch, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022*, diakses melalui www.antikorupsi.org pada 25 November 2023

Anomali Asas Non Retroaktif dalam Putusan MK Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/anomali-asas-non-retroaktif-dalam-putusan-mk-perpanjangan-jabatan-pimpinan-kpk-lt64bf766068098/>, pada 7 Desember 2023

Utami Argawati, Masa Jabatan Pimpinan KPK Lima Tahun, diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19196>, pada 12 Januari 2024

Refdine Micatie Esani, *Anomali Asas Non Retroaktif dalam Putusan MK Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/anomali-asas-non-retroaktif-dalam-putusan-mk-perpanjangan-jabatan-pimpinan-kpk-lt64bf766068098/>, pada 13 Januari 2024

